

***Collaborative Governance* Dalam Proses Pengembangan  
Desa Migran Produktif Di Desa Betak  
Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung**

***Collaborative Governance in the Development Process  
Productive Migrant Village in Betak Village  
Kalidawir District, Tulungagung Regency***

Ratno Saputro<sup>1</sup>, Dr. M. Daimul Abror, S.I.P., M.Si<sup>2</sup>,  
Dr. Imam Fachruddin., M.Si.<sup>3</sup>

Universitas Kadiri, Kediri, Indonesia<sup>123</sup>

noepetra85@gmail.com

**ABSTRAK**

Berdasarkan hasil penelitian dari pelaksanaan kolaborasi multi sektor yang melihat beberapa aktor kolaborasi diantaranya pemerintah, privat sektor dan masyarakat dalam pengembangan desa migran produktif di Desa Betak Kalidawir Tulungagung Jawa Timur. Adapun yang melatar belakangi tesis ini adalah adanya kompleksitas permasalahan di Desa migran yang indikasinya berasal dari warga desa yang mejadi pekerja migran serta anggota keluarga yang ditinggalkan di rumah.. untuk menganalisis permasalahan diatas, peneliti menggunakan rujukan teori collaborative governance yang dikembangkan oleh Gash N anshel 1980 dalam buku *Collaborative Governance* dalam Perspektif Administrasi Publik, Retno Sunu Astuti,2020.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan induktif terhadap seluruh proses penelitian untuk mendapatkan hipotesis dan temuan-temuan baru serta sesuai dengan teori para ahli yang relevan dengan konteks permasalahan penelitian

Hasil penelitan menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* Dalam Proses Pengembangan Desa Migran Produktif di Desa Betak Kalidawir yang melibatkan pemerintah desa, pihak terkait , privat sektor dan masyarakat berlangsung dengan baik dan mampu menciptakan sinergi dalam pengembangan program. Masing - masing aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program Desmigratif menunjukkan perannya dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ketersediaan berbagai prasarana yang dibangun atas hasil kolaborasi memberikan dukungan tersendiri bagi

kesuksesan program. Pemerintah desa berperan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program, peran stake holders memainkan perannya dengan penuh tanggung jawab, peran privat sektor juga memainkan perannya dengan profesional kemudian masyarakat (*civil society*) sebagai sasaran program berperan sebagai partisipan sekaligus menjadi bagian program yang ikut berkontribusi mendukung suksesnya program. Hal yang paling menonjol adalah bahwa Pemerintah Desa Betak masih menugaskan petugas desa khusus dalam upaya pengembangan Desa Migran Produktif.

### **ABSTRACT**

*This thesis was created based on research results from the implementation of multi-sector collaboration which saw several collaborative actors including the government, private sector and community in developing a productive migrant village in Betak Kalidawir Village, Tulungagung, East Java. The background to this thesis is the complexity of problems in migrant villages, the indications of which come from village residents who are migrant workers and family members who are left at home. To analyze the above problems, researchers use collaborative governance theory as a reference developed by Gash N Anshel 1980 in the book Collaborative Governance in a Public Administration Perspective, Retno Sunu Astuti, 2020.*

*The method used in this research is a descriptive qualitative method, with an inductive approach to the entire research process to obtain hypotheses and new findings and in accordance with expert theories that are relevant to the context of the research problem.*

*The research results show that Collaborative Governance in the Productive Migrant Village Development Process in Betak Kalidawir Village involving the village government, related parties, the private sector and the community is going well and is able to create synergy in program development. Each actor involved in implementing the Desmigrative program shows its role and runs as expected. The availability of various infrastructure built as a result of collaboration provides special support for the success of the program. The village government plays its role in providing full support for the implementation of the program, the role of stakeholders plays their role with full responsibility, the private sector also plays its role with professionals and then the community (*civil society*) as the target of the program acts as a participant as well as being part of the program which contributes to supporting the success of the program. The most prominent thing is that the Betak Village Government still assigns special village officers to efforts to develop a Productive Migrant Village.*

## **PENDAHULUAN**

Banyaknya pekerja migran yang berasal dari desa meginisiasi pemerintah untuk lebih memperhatikan wilayah desa sebagai basis penyumbang Pekerja MIgran Indonesia. Meski tidak dipungkiri bahwa keberadaan pekerja migran memberikan dampak yang baik bagi peningkatan perkeonomian serta pengurangan jumlah pengangguran namun disisi lain keberadaan Pekerja migran juga memberikan persoalan yang besar yang tidak cukup hanya dibayar dengan nilai ekonomi. Perdagangan orang (*Traficking*),maraknya kasus perceraian hingga kenakalan remaja di desa khususnya, setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata disumbang dari anggota keluarga Pekerja MIgran Indonesia. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan diantaranya pada tahun 2006 dengan membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau PBNP2TKI lalu amanat Undan-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) hingga tahun 2019 yang mana kebijakan tersebut terfokus pada wilayah desa sehingga terbit Permen Ketenagkerjaan no 2 tahun 2019 tentang Desmigratif yaitu pemberdayaan komunitas desa produktif yang warganya banyak menjadi Pekerja Migran Indonesia. Hal tersebut diatas semata-mata untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang sejahtera, adil merta sampai tercapai *Good Governance*

Bila memperhatikan konsep *Good Governance* yang melibatkan pemerintah, lembaga non pemerintah maupun masyarakat sebagai unsur yang terlibat dalam perumusan kebijakan, ini tak lepas dari pelaksanaan kegiatan kerjasama atau disebut kolaborasi. Kolaborasi yang dilakukan oleh unsur tersebut diatas syarat dengan keterlibatan multi sektor dari berbagai aktor kolaborasi yang menciptakan paradigma baru dengan istilah *Collborative Governance*.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi Desa Migran Produktif atau Desmigratif dirasa tidak dapat diselesaikan dengan mudah oleh sektor pemerintah

saja, oleh karenanya diperlukan *Collaborative Governance* agar capaian yang diharapkan bisa optimal

Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Jawa Timur merupakan Desa yang terpilih sebagai Desa Migran Produktif sejak tahun 2019. Bahkan saat ini masih banyak ditemui warga Desa Betak yang menjadi PMI. Data terbaru dari desa tahun 2023 menunjukkan bahwa dari total keseluruhan 2341 jiwa usia produktif kisaran 300 jiwa menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau kisaran 12 % warga Desa Betak yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). *Empat Pilar* unggulan Desa Migran Produktif (Desmigrati) seperti halnya pilar *Pertama* Pusat Layanan Informasi, *Kedua* kewirausahaan, *Ketiga* *community parenting* dan *Keempat* penciptaan koperasi telah dilaksanakan di Desa Betak Kalidawir saat terpilih menjadi Desa Migran Produktif tahun 2019, Sebagai desa migran produktif yang sudah melaksanakan program Desmigratif seharusnya desa ini sudah menjadi desa mandiri dan produktif sebagai wujud keberhasilan Empat Pilar unggulan Desmigratif yang menjadi ruh program Desmigratif. Namun pada kenyataannya di Desa Betak Kalidawir masih ditemui beragam persoalan yang terkait dengan keberadaan Pekerja Migran Indonesia, diantaranya adalah delapan dari sepuluh orang yang anggota keluarganya menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melakukan perceraian sah baik yang menjadi PMI pihak laki-laki atau sebaliknya hal ini dapat berdampak pada keutuhan keluarga yang berimbas terhadap pola asuh anak, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak hingga menghambat tumbuh kembang bakat dan potensi yang dimiliki. Inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian pada Desa Betak Kalidawir Tulungagung dengan judul *Collaborative Governance* Dalam Proses Pengembangan Desa Migran Produktif Di Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan induktif terhadap seluruh proses penelitian untuk

mengkontruksi temuan-temuan dan mengelaborasinya dengan teori-teori dari para ahli yang relevan dengan konteks permasalahan penelitian. Pengambilan data dilakukan dengan langsung terjun ke lokasi penelitian, Teknik pengambilan data dengan cara wawancara dengan informan kunci dibantu dengan observasi langsung ke lokasi penelitian serta didukung dokumentasi yang di dapat dari arsip desa maupun masyarakat yang berhubungan dengan *Collaborative Governance* Dalam Proses Pengembangan Desa Migran Produktif Di Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih mendalam atas hasil penelitian yang dilakukan agar tujuan penelitian yang di dapat lebih terang dan akurat, penlitit berpedoman pada teori analisis yang dikembangkan oleh ilmuwan Miles dan Huberman (1984), yaitu penarikan data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***A. Governance***

*Governance* adalah suatu keberadaan, kondisi dan keputusan-keputusan dalam pelayanan publik yang mana kondisi tersebut didapat atas konsensus dengan melibatkan unsur pemerintah,privat sektor dan masyarakat. Paradigma *governance* pada tahun 80an dianut dan populer mulai dirancang oleh negara-negara barat dengan meminimalisir peran-peran negara dalam pembangunan dan secara parsial mendelegasikan kepada aktor lain di luar pemerintah untuk membuat layanan kebutuhan publik. Pada tahun 1990an mulai diadopsi oleh beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia. *Governance* memiliki tiga aktor dalam pelaksanaannya yaitu *government*, *private sector* dan *civil society*.

Bergulirnya era reformasi di Indonesia yang menjunjung tinggi tonggak demokrasi tahun 90an sejalan dengan konsep dasar *good governance* yang menjadi ruh dan landasan pembangunan dalam arti luas. Hal tersebut berkembang menjadi sebuah konsep pelaksanaan kegiatan atas kebijakan yang dibuat. Saat ini paradigma *good governance* menciptakan turunan yang terwujud dalam pelaksanaan kegiatan untuk mengimplemmentasikan kebijakan publik yang dilatarbelakangi suatu konsesus dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dirasa tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak, hal ini disebut *Collaborative Governance*

### ***B. Collaborative Governance***

Kolaborasi adalah pola dan bentuk hubungan yang dilakukan antar individu ataupun organisasi yang berkeinginan untuk saling berbagi, saling berpartisipasi secara penuh, dan saling menyetujui atau bersepakat untuk melakukan tindakan bersama dengan cara berbagi informasi saling melengkapi dengan sumber daya yang dimiliki untuk menuju satu tujuan yang disepakati. Menurut Ansell dan Gash (2007:543). *Collaborative governance* merupakan suatu forum yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Senada dengan yang dijelaskan oleh Donahue dan Zeckhauser (2011) bahwa *collaborative governance* merupakan kondisi yang mana pemerintah untuk memenuhi tujuan publik melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu. *collaborative governance* adalah upaya menyatukan perbedaan sudut pandang dan program pembangunan untuk dipadukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan optimal.

### ***C. Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desamigran Produktif .***

Merujuk pada Permendagri no 02 tahun 2019 tentang Desmigratif yang mengedepankan Empat Pilar Unggulan, maka dalam penelitian ini terfokus pada peran aktor kolaborasi dalam pelaksanaan pengembangan program Desa Migran desmigratif di Desa Betak Kalidawir empat pilar unggulan diantaranya:

#### **1. *Collaborative Governance* dalam Pilar Pusat Layanan informasi**

Pusat Layanan Informasi adalah suatu tempat yang mewadahi segala informasi terkait dengan Pekerja Migran Indonesia, baik Calon Pekerja Migran, Pekerja Migran itu sendiri dan keluarganya hingga mantan Pekerja Migran yang sudah kembali ke desa asal, Hasil penelitian *collaborativr governance* dalam pilar Pusat Layanan Informasi menjelaskan bahwa keterlibatan aktor kolaborasi yaitu pemerintah,privat sektor dan masyarakat menunjukkan peranya masing-masing yang di jabarkan secara rinci sebagai berikut:

**a. Pemerintah**

Adapun peran pemerintah dalam pengembangan pusat layanan informasi yaitu:

1. Sebagai pihak yang mengkoordinir keberadaan tempat pusat layanan Informasi yang berhubungan dengan Pekerja Migran Indonesia
2. Sebagai penyedia lahan,lokasi untuk dibuatnya tempat pusat layanan informasi
3. Sebagai pihak yang akan menyediakan petugas Pusat Layanan Informasi

**b. Privat sektor**

Peran privat sektor dalam pengembangan Pusaat Layanan Informasi diantaranya sebagai berikut:

1. Membantu anggaran dalam hal pembiayaan untuk tersedianya Tempat Pusat Layanan Informasi
2. Menyediakan Layanan dalam hal transaksaksi keuangan dari PMI dari luar negeri yang di kirimkan ke keluarganya di desa asal
3. Memberikan edukasi keamanan dalam transaksi keuangan baik dari calon pekerja migran, Pekerja Migran ataupun keluarganya

**c. Masyarakat**

Peran masyarakat dalam pengembangan Pusat Layanan Informasi dianranya sebagai berikut:

1. Sebagai partisipan sekaligus sebagai responden yang merasakan keberadaan Pusat Layanan Informasi tersebut sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan atau belum
2. Kebudayaan masyarakat desa yang erat dengan kegiatan gotong royong maka peran masyarakat dalam penyediaan Pusat Layanan Informasi adalah menyediakan tenaga kerja untuk membantu dalam pembangunan Tempat Pusat Layanan Informasi

## **2. *Collaborative Governance* dalam Kewirausahaan**

Kewirausahaan sebagai pilar kedua dalam pengembangan desa migran produktif yaitu upaya menciptakan jiwa dan mental masyarakat untuk menjadi pengusaha guna memanfaatkan dan memaksimalkan potensi serta produktifitas di desa migran dengan melibatkan unsur governance yaitu pemerintah, privat sektor dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Betak Kalidawir dapat dilihat peran masing-masing aktor *collaborative governance* dalam pengembangan desa migran produktif di Desa Betak Kalidawir Tulungagung di Pilar Kewirausahaan adalah sebagai berikut:

### **a. Pemerintah**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian menerangkan bahwa peran pemerintah dalam hal ini Pemerintah Desa Betak diantaranya adalah :

1. Sebagai inisiator yang mengadakan program pelatihan kewirausahaan
2. Sebagai kordinator yang mengkoordinasi para aktor untuk melaksanakan program pencitaan kewirausahaan
3. Sebagai wadah yang mengakomodir warga desa Betak untuk mengajukan permohonan mengikuti pelatihan kewirausahaan

4. Sebagai fasilitator yang memfasilitasi warga desa menjadi peserta pelatihan maupun warga desa yang menjadi narasumber (pilot project) atas keberhasilannya menjalankan usaha yang digelutinya

**b. Privat Sektor**

Privat sektor sebagai unsur *collaborative governance* dalam hal Kewirausahaan berperan penting dalam menciptakan atau menumbuh kembangkan jiwa dan mental wirausaha warga desa Betak Kalidawir, baik para calon pekerja migran, keluarga migran ataupun mantan pekerja migran. Adapun peran privat sektor adalah sebagai berikut:

1. Investor
2. Lembaga pendamping pelatihan kewirausahaan
3. Partnership kemitraan

**c. Masyarakat**

Masyarakat sebagai unsur terpenting yang menjadi responden dan sasaran program mempunyai peran diantaranya:

1. Partisipan
2. Responden
3. Partisipatif
4. Penerima manfaat

**3. Collaborative Governance dalam kegiatan Community Parenting**

*Community Parenting* sebagai pilar ketiga Desmigratif yang bertujuan memberikan wawasan, pemahaman terhadap pola asuh pada anak dan keluarga yang ditinggalkan Pekerja di desa asal diharapkan dapat membantu keluarga PMI memberikan pola asuh anak yang baik dan benar agar anak PMI yang ditinggalkan dirumah dapat tumbuh kembang sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat di lokasi penelitian dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* yang melibatkan para aktor kolaborasi dalam hal *community parenting* ditemukan hal-hal baru dalam pengembangan Desa Migran produktif di Desa Betak Kalidawir. Berikut akan diterangkan pelaksanaan kolaborasi sesuai dengan peran masing-masing aktor yang terlibat diantaranya adalah sebagai berikut:

**a. Pemerintah**

Pemerintah Desa sebagai unsur *collaborative governance* dalam pelaksanaan kegiatan kolaborasi dalam hal *community parenting* berperan sebagai

1. Pelaksana sekaligus Inisiator
2. Koordinator
3. Fasilitator

**b. Privat Sektor**

Peran privat sektor dalam pelaksanaan kolaborasi dalam hal *community parenting* adalah sebagai berikut:

1. Narasumber
2. Mentor

**c. Masyarakat**

Adapun peran masyarakat dalam pelaksanaan kolaborasi dalam hal *community Parenting* adalah sebagai berikut:

1. Partisipan
2. Responden
3. Pelaksana sekaligus penerima manfaat program

**4. *Collaborative Governance* dalam Penciptaan Koperasi**

Hasil penelitian di pilar penciptaan koperasi dalam pengembangan desa migran produktif di Desa Betak Kalidawir adalah sebagai berikut:

**a. Pemerintah**

Adapun peran pemerintah dalam pelaksanaan kolaborasi dal hal penciptaan koperasi adalah sebagai Badan tunggal yang memainkan peran koperasi melalui BUMDes yang mengelola tunggal Badan Usaha Milik Desa Betak Kalidawir

**b. Privat Sektor**

Dipilar ini privat sektor tidak ditemukan terlibat dalam hal penciptaan koperasi

**c. Masyarakat**

Peran masyarakat adalah sebagai nasabah atau pihak peminjam modal atas keberadaan koperasi dalam hal ini BUMDes Desa Betak Kalidawir.

**D. Faktor pendukung**

Faktor pendukung collaborative governance dalam pengembangan desa migran produktif di desa betak kalidawir merupakan faktor yang menjadi daya tarik para aktor dalam melakukan kegiatan kolaborasi pengembangan desa migran produktif di Desa Betak Kalidawir.

Adapun faktor pendukung tersebut diantaranya adalah:

1. Profesionalitas adalah setiap aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bekerja dengan professional
2. Persamaan Emosional adalah bahwa para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut mempunyai persamaan emosional sama-sama ikut merasakan senasib dan sepenanggungan dalam upaya mencapai peningkatan ekonomi keluarga
3. Tanggung jawab artinya bahwa para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut memiliki rasa tanggung jawab dalam kesuksesan dan capaian program seperti apa yang diharapkan
4. Pngkatan perekonomian artinya bahwa para aktor kolaborasi mempunyai harapan dalam agar suksesnya program berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat

### **E. Faktor penghambat**

Salah satu faktor yang menyebabkan kurang lancarnya pelaksanaan Collaborative governance dalam pengembangan Desa migran produktif di Desa Betak Kalidawir dan ini bisa menyebabkan capaian program tidak dapat terwujud dengan optimal.

Berdasarkan hasil penelitian penghambat di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi bahwa kurangnya sosialisasi atas keberadaan program yang menyebabkan terbatasnya sebaran dan aktifitas program tidak maksimal
2. Terbatasnya SDM bahwa ada dua hal ini pertama terbatasnya kualitas SDM dan kedua dalam jumlah ketersediaannya
3. Kurangnya pemahaman program

Kurangnya pemahaman program dalam arti luas dan terbatas dalam jumlah sasaran program yang terlibat dalam hal ini masyarakat, sehingga bisa berdampak pada kurangnya penerima manfaat

### **F. Kesimpulan**

Kolaborasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa pihak baik kelompok maupun individu dalam upaya menemukan solusi atas permasalahan yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.

Permen Ketenagakerjaan no 02 tahun 2019 tentang desmigratif yang mengedepankan empat pilar unggulan yaitu Pusat Layanan Informasi, Kewirausahaan, *Community Parenting* dan Penciptaan Koperasi menjadi rujukan peneliti dalam menterjemahkan potret pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan desa migran produktif di Desa Betak Kalidawir serta menggaambarkan peranan masing-masing aktor yang menjadi unsur governance yaitu Pemerintah, Privat Sektor dan masyarakat sesuai peran yang dimainkan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam proses pengembangan Desa Migran Produktif di Desa Betak Kalidawir yang melibatkan unsur governance yaitu pemerintah desa, privat sektor dan masyarakat berlangsung

dengan baik dan mampu menciptakan sinergi dalam pengembangan program. Masing-masing aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program Desmigratif menunjukkan perannya dan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ketersediaan berbagai prasarana yang dibangun atas hasil kolaborasi lintas sektor memberikan dukungan tersendiri bagi kesuksesan program. Dari pemerintah desa memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program, dari stake holders memainkan peran dengan penuh tanggung jawab, selanjutnya peran Privat sektor juga memainkan perannya dengan profesional kemudian peran serta civil society sebagai sasaran program juga ikut berpartisipasi menjadi bagian program dan berkontribusi dalam suksesnya program. Selain itu juga dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut juga ditemui faktor pendukung dan faktor penghambat yang ikut mewarnai dinamika kolaborasi dalam pengembangan desa migran yang adapun ***Faktor Pendukung*** yaitu Profesionalitas Persamaan Emosional, Taggung jawab dan peningkatan perekonomian dan juga ditemui ***faktor pengmbat*** yaitu Kurangnya Sosialisasi, kurangnya SDM dan minimnya pemahaman program

Hal yang paling menonjol dan berbeda dengan desa yang lain yang juga mendapatkan program desmigratif adalah di Desa Betak masih menggunakan petugas Desmigratif desa sedangkan di desa lain di kecamatan kalidawir saat ini tidak ada lagi petugas desa yang khusus menangani persoalan desmigratif. Keberadaan petugas desmigratif di desa Betak di inisiasi oleh kepala desa Betak yang pembiayaan petugas tersebut dialokasikan dari pos Anggaran Dana Desa. Namun sayangnya pada saat ini di desa betak tidak ada program agenda khusus ataupun kebijakan tertentu yang di buat oleh pemerintah desa terkait dengan kolaborasi dalam upaya penangani persoalan masyarakat desa migran sehingga tidak ada tindak lanjut dalam jangka waktu yang panjang, selain itu pemahaman dan kesadaran masyarkat desa Betak secara keseluruhan kurang begitu memahami akan pentingnya program.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

**Ratno Saputro<sup>1</sup>, Dr. M. Daimul Abror, S.I.P., M.Si<sup>2</sup>, Dr. Imam Fachruddin., M.Si.<sup>3</sup>**  
***Collaborative Governance* Dalam Proses Pengembangan Desa Migran Produktif Di Desa  
Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung**

- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Penerbit.  
Universitas Indonesia. Moleong, J.L. (2007). Dalam buku Metode  
Penelitian Kualitatif
- Retno Sunu Astuti, 2020. *Collaborative Governance* dalam Persepektif  
Administrasi Publik. Penerbit Prgram Studi Doctor Adminstrasi Publik  
Universitas Diponegor Press.Jl. Diponegoro VII no 35- Semarang